

Watak Kepedulian dalam Kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini

Yeremias Jena

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yeremias.jena@gmail.com

ABSTRACT

Traditional ethics such as deontology which prioritizing the observance of moral subject to ethical principles, or utilitarianism that weight higher the benefits of the majority rather than the interests of individuals, it is increasingly recognized that such ethical theories have forgotten the relational aspects of moral action. To act morally is in the first place not for the sake of the observance of moral principles, but the recognition that individuals who relate to him is a moral person whose interests must be taken into account, and that the interests of moral patient that gave birth to moral duty is actually the source that drives moral behavior. That is what we labeled as the ethics of care. The author of this paper describes how an ethic of care has colored the leadership characters of Tri Rismaharini, the mayor of Surabaya. The author shows that people's interest is the source of moral obligation that drive her to build the city of Surabaya, and that the interests of the people can only be understood in a caring relation with the community itself.

Keywords: ethical caring, caring about, taking care of, care giving, receiving care, virtue

PENDAHULUAN

Etika kepedulian sering dipertentangkan dengan etika keadilan dalam dua aspek. *Pertama*, ketika etika kepedulian memusatkan perhatian pada watak, seperti simpati, bela-rasa (*compassion*), dan persahabatan, etika keadilan menekankan aspek pilihan otonomi individu dan kesetaraan (variasi dari teori keadilan ini adalah keadilan distributif dan keadilan libertarian yang melingkupi konsep mengenai upaya menyeimbangkan hak-hak individu dan tanggung jawab). Dalam arti itu, etika kepedulian lebih dipahamiberkarakter komunitas, sementara etika keadilan berkarakter individualistik (French & Weis, 2000:125-136; White, 2009:459-483).

Karakter individualistik ini tampak jelas dalam kritik Martha Nussbaum terhadap etika keutamaan. Sebagai pembela universalisme liberal, Nussbaum berpendapat bahwa etika kepedulian harus ditolak karena bersifat "kepedulian buta" (*blind care*), yakni perilaku memedulikan orang lain sebagai imperatif dari "*maternal love*" sebagaimana dipromosikan Nel Noddings. Bagi Nussbaum, cinta kasih keibuan (*maternal love*) sebagai sumber moral dapat bersifat memaksa karena tidak memberi ruang bagi individu untuk menolak dipedulikan. Karena

itu, menurut Nussbaum, etika kepedulian hanya dapat dipertahankan – dengan demikian dapat diakomodasi dalam „universalisme liberal“ – sejauh bersifat “*reflective caring*”. Dengan sifat ini, individu diposisikan sebagai subjek bebas yang memilih masuk ke dalam sebuah relasi berkepedulian atau tidak (Held, 2006:94-95). Bagi para pembela etika kepedulian, pandangan semacam ini tidak hanya memosisikan etika kepedulian sebagai universalisasi dari pilihan bebas individu untuk masuk dalam relasi berkepedulian, tetapi juga melupakan pentingnya “hubungan personal” dengan subjek moral lain, dan dengan demikian, perlakuan terhadap mereka tidak pernah bersifat sama dan seragam (Held, 2006:95).

Kedua, etika keadilan dipahami sebagai etika yang mendasarkan dirinya pada salah satu dari tiga pandangan etika umum, yakni etika yang berfokus pada prinsip (deontology), tujuan (teleologi), dan hasil akhir (konsekuensialisme). Demikianlah, ada etikawan yang sangat menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip moral secara ketat dalam bentuk kewajiban (*deontos*), ada juga etikawan yang lebih menekankan prosedur atau yang memprioritaskan tujuan (*telos*) daripada sekadar kesetiaan pada prinsip-prinsip moral atau pada prosedur pengambilan putusan moral.

Para pendukung etika kepedulian, terutama kaum feminis, sering mengkritik etika keadilan sebagai pendekatan etika yang kurang memberi ruang bagi prosedur karena lebih mementingkan kesetiaan pada prinsip-prinsip moral atau konsekuensi sebuah tindakan moral. Bagi mereka, prinsip penjustifikasi tindakan moral dalam teori-teori Barat tentang keadilan sangat menekankan kesetaraan (*equity*) atau apa yang sering disebut karakter maskulinitas dari etika, yang pada gilirannya digerakkan oleh kepantasan (*merit*) dan bukan oleh kepedulian (*care/nuturance*). Jadi, misalnya, seseorang berhak mengakses fasilitas publik jika dia adalah warga negara yang taat membayar pajak atau yang memiliki kemampuan membayar. Atau, hak hidup seseorang hanya dapat dipertimbangkan sejauh keuntungan dari memertahankan hidup itu melebihi totalitas keberpihakan pada hak hidup orang/makhluk lainnya dalam tradisi utilitarisme (Boss, 2008:345-348).

Pertanyaannya apakah etika yang hanya menekankan aspek maskulinitas mampu menyelesaikan seluruh problem moral? Apakah, misalnya, protes warga negara terhadap berkurangnya lahan hijau karena pemerintah kota memberikan izin penggunaan lahan kepada para pengembang tanpa menyisakan ruang terbuka hijau dapat diatasi dengan pendekatan utilitaristik, misalnya demi kepentingan dan kemakmuran sebesar-besarnya orang? Memang masih terdapat perdebatan yang hangat seputar etika kepedulian versus keadilan, seakan-akan etika kepedulian tidak memberi ruang bagi problem keadilan, tetapi pertanyaan yang tetap relevan adalah sejauh manakah etika kepedulian dapat menjadi nilai moral dasar bagi pengaturan sebuah masyarakat.

Joan C. Tronto berpendapat bahwa etika kepedulian dapat menjadi nilai moral dan dasar bagi pengaturan sosial karena jenis etika ini mengusahakan pendekatan “terlibat” (*engaged approach*) sebagai pengganti terhadap pendekatan “ketakterlibatan” (*disengaged approach*) sebagaimana sangat ditekankan dalam etika Kantian. Bagi Tronto dan para pendukung etika kepedulian, tujuan tertinggi yang dikejar dalam sebuah kehidupan bersama adalah harmoni dan bukan sekadar tata masyarakat yang adil (French & Weis, 2000:125-136). Ini sejalan dengan

pandangan bahwa kita sedang melupakan etika kepedulian yang sebenarnya merupakan etika tertua karena dapat dikembalikan kepada tulisan-tulisan Aristoteles. Lupa akan etika kepedulian dalam sejarah filsafat inilah yang menyebabkan jenis etika ini seakan-akan kehilangan pamor dan pengaruhnya sejak beberapa abad lalu di Barat (French & Weis, 2000:125-136).

Prinsip-prinsip etika kepedulian sebenarnya telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi/bisnis, ataupun bidang kepemimpinan politik. Dalam bidang kepemimpinan, misalnya, orang tidak hanya berbicara mengenai kepemimpinan yang etis atau tidak etis, bahwa hanya kepemimpinan yang etis yang bersifat transformatif. Akhir-akhir ini sering didiskusikan pula kepemimpinan berdasarkan keutamaan-keutamaan tertentu, seperti kelembahlembutan, kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, kesederhanaan, dan keadilan (Knights & O'Leary, 2006:125-137) dengan prinsip-prinsip etika kepedulian yang memberi warna khusus kepemimpinan yang etis (Ciulla, 2009:3-4).

Bagi etika kepedulian, kepemimpinan dipahami tidak sekadar sebagai kemampuan seseorang menjalankan kekuasaannya dan memaksakan ketaatan orang lain atas otoritas kekuasaannya tersebut. Etika kepedulian memosisikan kekuasaan sebagai yang bersifat "relasional" dan bukan "penguasaan" (*possession*). Dengan demikian, mengikutkan dan memedulikan mereka yang dipimpinnya. Kekuasaan pertama-tama adalah memedulikan, membuat orang yang dipimpin mengalami kehadiran dan kepedulian pemimpinnya dan merelakan diri untuk dipimpin dan diarahkan, berpartisipasi dalam dan bersama-sama merealisasikan berbagai kebijakan publik demi mencapai cita-cita bersama (Held, 2006:150-151).

Kepemimpinan berbasis etika kepedulian harus mencerminkan elemen-elemen etika kepedulian, seperti perhatian (*attentiveness*), tanggung jawab, kemampuan (*competence*) dalam memberi perhatian dan tanggung jawab, serta tanggapan positif dari pihak yang dipedulikan (Gastmans, 2006:135-148). Pemimpin yang berkepedulian adalah pribadi moral dengan nilai-nilai keutamaan yang kuat, yang mendorongnya memroteksi warganya dari bahaya dan kematian. Elemen perhatian (*attentiveness*) adalah kondisi awal kepedulian. Seseorang memiliki perhatian jika ia telah mampu mengenal dan mengakui eksistensi orang lain, mengenal dan mengakui kebutuhan-kebutuhan mereka sebelum memberikan tanggapan atas kebutuhan tersebut. Inilah elemen "peduli tentang" (*caring about*) yang tidak pernah boleh memaksakan kehendaknya sebagai jalan keluar dalam menjawab berbagai kebutuhan "yang dipedulikan" (Noddings, 2013:30-40).

Pengalaman terpapar dengan kondisi nyata masyarakat dan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam tradisi etika kepedulian tidak pernah menolerir sikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Kesadaran akan kebutuhan orang lain membuat seseorang tersentuh secara emosional dan mendorongnya untuk bersikap etis terhadap mereka, misalnya mengentaskan kemiskinan, mengolah dan mendaur ulang sampah, atau menggratiskan biaya pendidikan. Inilah elemen tanggung jawab atau elemen memelihara, menjaga, merawat, atau menyembuhkan (*taking care of*) (Tronto, 2005:251-263).

Seseorang mampu mengambil tanggung jawab dan melakukan kebaikan kepada orang lain jika memiliki kemampuan (*competence*) melakukannya. Dalam konteks kepemimpinan politik, mengalokasikan dana publik untuk pembangunan fasilitas umum, perbaikan sarana

pendidikan, dan sebagainya adalah bagian penting dari elemen kemampuan. Tentu elemen kemampuan juga meliputi kompetensi kognitif, emosional, dan elemen-elemen lainnya yang sifatnya personal dan yang memungkinkan seseorang mengambil tindakan moral tertentu secara cepat dan tepat (Tronto, 2005:251-263).

Pihak yang dipedulikan (*cared-for*) bukan sekadar objek tindakan moral. Mereka harus tanggap terhadap tindakan berkepedulian, bahkan ikut ambil bagian secara aktif di dalamnya. Hanya dengan demikian, tindakan berkepedulian dapat menjadi sikap dan tindakan etis timbal-balik antara “si pemeduli” (*the one caring*) dan “si terpeduli” (*care receiving*) dalam tradisi etika kepedulian (Tronto, 2005:251-263).

Elemen-elemen etika kepedulian yang disebutkan terdahulu hanya dapat menggerakkan seseorang untuk bertindak secara etis jika subjek moral memiliki keutamaan. Keutamaan sebagai elemen penting dalam etika kepedulian justru menegaskan segi kognitif dan afektif sebagai daya dorong tindakan moral, bukan daya dorong tidak stabil karena aspek emosi yang rentan terhadap perubahan, tetapi daya dorong yang bersifat tetap karena kebaikan moral dalam diri subjek moral (Gastmans 2006:139). Demikianlah, aspek perhatian (*attentiveness*) terhadap keadaan seseorang yang memicu emosi/perasaan moral tertentu hanya akan menjadi tindakan moral jika subjek moral adalah pribadi moral yang berkeutamaan.

Terpapar pada situasi yang buruk dan membahayakan sering menjadi pengalaman moral yang mendorong seseorang mempraktikkan etika kepedulian. Dalam situasi demikian, kewajiban moral pertama dan terutama adalah memroteksi dan menghindarkan seseorang dari bahaya dan kematian. Inilah bentuk perhatian (*attentiveness*) yang mendorong tindakan moral sebagai sikap yang mendahului dan melampaui berbagai diskusi moral yang mementingkan ketaatan pada prinsip-prinsip moral universal.

Penulis dalam tulisan ini membaca tulisan dan berita media massa mengenai kepemimpinan Tri Rismaharini, wali kota Surabaya, periode 2010–2015 dari sudut pandang etika kepedulian. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah apakah praktik dan kebijakan publik di masa kepemimpinan Tri Risma mencerminkan karakter-karakter etika kepedulian. Sejauh mana karakter-karakter tersebut dapat didiskusikan dalam kerangka etika kepedulian pada umumnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap watak kepedulian dalam kepemimpinan Tri Rismaharini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif jenis analisis tematik. Disebut metode kualitatif karena penulis melibatkan diri dalam kejadian/peristiwa tertentu dan berusaha memahaminya serta menyusunnya berdasarkan logika berpikir tertentu dan kemudian bergerak ke arah pernyataan dan teori-teori untuk menjelaskan kejadian/peristiwa tersebut (Tracy, 2013:1-51).

Analisis tematik adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada upaya menguji tema-tema atau pola-pola tertentu dalam suatu data tertentu sebelum dijadikan sebagai kategori untuk kemudian dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang sudah baku (Guest, 2012). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku yang mendeskripsikan pendapat, sikap atau tindakan Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya

periode 2010–2015. Buku-buku yang dijadikan data penelitian adalah Budiraharso (2014), Rini (2014), Semesta (2014), Susanti (2014), Asrof Fitri (2014), dan Dinanta (2014).

Mengikuti tahap-tahap analisis tematik (Rennie, 2012:385-397), data-data tersebut dianalisis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, penulis membaca setiap buku sebanyak dua kali. Pembacaan pertama dimaksud untuk mengidentifikasi tema-tema atau isi yang sama (kesamaan itu terjadi karena sumber buku berasal dari berita media massa yang sama). Pembacaan kedua dilakukan berdasarkan sudut pandang etika kepedulian. Penulis kemudian memberi kode angka 1–6 di setiap bab/subbab/paragraf sesuai dengan pengertian setiap elemen etika kepedulian (angka 1 artinya *care giving*; angka 2 artinya *taking care of*; angka 3 artinya *care giving*; angka 4 artinya *care receiving*; angka 5 artinya kepedulian sebagai keutamaan; dan angka 6 artinya kewajiban memroteksi dan menghindari seseorang dari bahaya kematian).

Kedua, mengumpulkan data-data dengan kode yang sama dari setiap buku ke dalam kolom yang penulis sediakan dalam file *microsoft word*.

Ketiga, berdasarkan pengertian tentang etika kepedulian sebagaimana dideskripsikan dalam setiap elemen etika kepedulian, penulis mencermati sekali lagi apakah pengelompokan data-data ke dalam kolom kategori yang sama sudah tepat atau belum. Di sini terjadi bahwa ada data-data tertentu yang harus penulis pindahkan ke kolom lain yang lebih sesuai.

Keempat, penulis mulai menafsirkan dan menjelaskan data-data dari setiap kolom dengan menggunakan elemen-elemen etika kepedulian dan perspektif etika kepedulian lainnya yang sesuai. Setelah itu, penulis melaporkan hasil pemahaman ini dalam bentuk makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lebih dari dua puluh lima tahun lalu, etika kepedulian dihubungkan dengan putusan moral yang dibuat oleh kaum perempuan dalam ranah pribadi, termasuk dilema-dilema moral yang dihadapi yang sifatnya pribadi. Akan tetapi, tidak demikian dengan abad masa ini ketika para pendukung etika kepedulian mencoba meyakinkan bahwa etika kepedulian mampu membimbing perilaku moral manusia melampaui ranah domestik dan partikular. Mereka yakin bahwa etika kepedulian dapat menjadi prinsip yang melandasi perilaku moral manusia dalam konteks yang lebih umum, termasuk konteks politik (Petterson, 2011:51). Joan Tronto dan Berenice Fisher mendefinisikan kepedulian (*care*) dalam etika kepedulian sebagai “*a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our „world“ so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web*” (Tronto, 2010:160). Demikianlah, tindakan moral yang mengandung karakter kepedulian, menurut definisi tersebut, harus merupakan tindakan moral yang berusaha memertahankan, melanjutkan, dan memperbaiki dunia tempat tinggal kita supaya dapat hidup dengan baik. Tindakan moral berkarakter kepedulian selalu merupakan *purposive practice* dan relasional (Tronto, 2010:161).

Ditempatkan dalam konteks praktik politik dan kebijakan publik, etika kepedulian tidak melekat pada institusi *per se* sebagai organ atau medium dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada orang yang menggerakkan institusi atau organ dimaksud. Karena itu, pertanyaan yang

relevan sehubungan dengan praktik politik dan kebijakan publik yang memiliki kepedulian bukan terletak pada institusi atau birokrasi mana yang paling memiliki kepedulian, melainkan pada siapakah penggerak institusi yang menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya dalam ranah etika kepedulian (Tronto, 2010:158-159). Demikianlah, kalau pun birokrasi bersifat rasional, imparisial, dan berjarak dengan masyarakat, orang yang mempraktikkan birokrasi dapat memilih pendekatan yang lebih menonjolkan karakter kepedulian yang lebih terlibat dan personal. Dalam konteks ini, menarik untuk didiskusikan praktik politik dan pelaksanaan kebijakan publik Tri Rismaharini dalam ranah etika kepedulian.

Karakter 1: Peduli tentang (caring-about)

Karakter *caring-about* mengandaikan seseorang memiliki “perhatian” (*attentiveness*), orang yang sudah keluar dari dirinya sendiri, mau mengambil risiko (*getting muddy of oneself*) dan kehendak untuk “mengemong” orang lain (Tronto, 2010:163). Risma termasuk pemimpin yang memiliki kepedulian semata-mata dalam arti ini, terutama ketika dia melibatkan diri menolong masyarakat bukannya kepentingan dirinya. Risma tidak hanya mau mengotori tangannya sendiri, tetapi juga mau keluar dari kepentingan dirinya. Ini nyata dalam sikapnya yang sangat marah terhadap perempuan pelaku penjualan manusia (Budiraharso, 2014:62; Rini, 2014:96). Sementara itu, Risma juga sudah berhasil keluar dari kepentingan dirinya sendiri. Ini nyata dalam bagaimana dia melaksanakan kebijakan-kebijakannya tanpa harus dipublikasi (Semesta, 2014:127-129; Susanti, 2014:62,75). Kenyataannya, Risma sendiri memang tidak ingin kegiatan pelayanan kepada masyarakat diliput dan dipublikasikan media massa.

Karakter *caring about* memang dekat dengan watak perempuan yang suka memelihara, merawat, atau “mengemong”. Ini bahkan diakui Risma sebagai kelebihanannya. “Kelebihan saya sebagai wanita, saya bisa merasakan seperti seorang ibu bagi seluruh kota” (Rini, 2014:95). Kelebihan ini juga nyata dalam bagaimana Risma selalu melibatkan emosi dalam bekerja meskipun mengetahui ini sering sangat berat dan mengaduk-aduk (Rini, 2014:94; Susanti, 2014:26). Watak sebagai ibu yang suka merawat ini juga nyata dalam sikap menjadi seperti guru yang harus telaten dan sabar mendampingi dan mengarahkan bawahannya. “Jadi, saya bekerja seperti guru, menjelaskan ke staf-staf. Prinsipnya, tidak ada pemimpin sukses tanpa dukungan dari staf. Jangan anggap mereka objek, tetapi subjek yang harus dilibatkan dalam pekerjaan.” (Semesta, 2014:43).

Sebagaimana ditekankan Chris Gastmans, karakter *caring about* mengandaikan *care giver* sudah mampu melampaui berbagai kepentingannya, keluar dari dirinya sendiri dan bekerja hanya demi kebaikan mereka yang dilayaninya. Ini tampak dalam kepemimpinan Risma, terutama dalam pilihan hidup sederhana dan bagaimana dia memaknakan kekuasaan bukan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Hidup sederhana, bahkan menjadi jati diri Risma, dan ini dipraktikkan, misalnya, dengan tidak menempati rumah dinas karena dianggap terlalu besar dan mewah, menampilkan diri secara sederhana tanpa pakaian dan tata rias yang mencolok, menghindari perhiasan mewah, dan semacamnya (Rini, 2014:109-114; Semesta, 2014:94;

Susanti, 2014:43). Bahkan, Risma tidak sungkan-sungkan menggunakan sepeda motor ke kantor ketika jalanan macet (Semesta, 2014:45).

Karakter 2: Tindakan memedulikan (taking care of)

Para pendukung etika kepedulian (Tronto, Manning, Noddings) berpendapat bahwa pemahaman yang simpatik akan penderitaan dan kerentanan sesama tidak hanya mendorong seseorang memiliki kepedulian, tetapi juga kemauan untuk mengekspresikan kepedulian tersebut dalam bentuk tanggung jawab menolong, merawat, membebaskan dari penderitaan, mendukung, menciptakan kondisi kehidupan sosial yang lebih baik, dan sebagainya. Elemen utama dalam karakter *taking care of* adalah tanggapan (Manning, 1998:98-105) dan tanggung jawab seseorang untuk merawat, menolong, membebaskan, atau pun menciptakan kondisi kehidupan sosial yang lebih manusiawi (Tronto). Karakter-karakter kepedulian semacam ini nyata dalam praktik politik dan kepemimpinan Risma.

Kebijakan penutupan berbagai pusat prostitusi di Kota Surabaya menjadi contoh nyata tanggung jawab Risma dalam menciptakan kondisi kehidupan sosial yang lebih manusiawi (penutupan prostitusi Tambak Sari, Kremil, pada tanggal 28 April 2013, Moroseneng pada tanggal 25 Agustus 2013, Dupak Bangunsari pada tanggal 27 Oktober 2013, Semeni pada tanggal 22 Desember 2013, dan Dolly pada tanggal 19 Juni 2014 (Budiraharso, 2014:95-123). Ini berawal dari sikap simpatik dan kesadaran atau kepekaan moral Risma yang menemukan bahwa ternyata prostitusi di Kota Surabaya melibatkan perdagangan anak (Budiraharso, 2014:103; Dinanta, 2014:40-42). Fakta lain yang terkuak adalah anak-anak perempuan yang seharusnya bersekolah justru menjadi PSK, sementara anak-anak laki-laki di bawah umur ikut menjadi pelanggan PSK (Budiraharso, 2014:102; Semesta 2014:30-31). Selain itu, anak-anak juga sering menjadi korban ketidakharmonisan rumah tangga akibat praktik prostitusi di sekitar tempat tinggal mereka (Budiraharso, 2014:103).

Risma memahami bahwa menutup lokalisasi prostitusi adalah bagian integral dari tanggung jawabnya menyelamatkan generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Dia tidak ingin generasi muda masa depan bangsa ini menjadi rusak akibat adanya lokalisasi (Budiraharso, 2014:103). Bagian dari tanggung jawabnya juga adalah mempersiapkan para PSK dengan keterampilan tertentu agar mereka mampu memulai “profesi” yang baru (Budiraharso, 2014:103-104), misalnya melalui pelatihan membuat kerajinan tangan (Semesta, 2014:34-35; Dinanta, 2014:45), tetapi juga mempersiapkan para pedagang dan pelaku usaha yang selama ini berbisnis di kawasan prostitusi melalui penyediaan kemudahan mengakses modal usaha (Semesta, 2014:106).

Selain penutupan berbagai lokalisasi prostitusi di Kota Surabaya, pembuatan taman kota juga menjadi contoh kepedulian Risma dalam menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi. Terbukti Risma sudah berhasil membangun sekitar empat belas taman kota, dan ini didorong oleh kepeduliannya akan pentingnya taman sebagai ruang publik, tempat berkumpulnya berbagai lapisan dan golongan masyarakat. Bagi dia, Kota Surabaya harus menjadi rumah bagi semua warga (Semesta, 2014:37; Dinanta, 2014:24-27), begitu pula dengan taman kota yang harus dapat

diakses dan dimanfaatkan oleh siapa saja. “...Saya membayangkan taman itu harus menjadi tempat berkumpulnya segala macam orang, dari berbagai latar belakang, termasuk si kaya dan si miskin, makanya taman itu harus bersih, cantik dan aman”. (Budiraharso2014: 75). Sebagai ruang publik, taman adalah ruang peleburan sekat sosial. Ini akan menjadi contoh untuk membangun kota yang layak huni bagi semua warga masyarakat, termasuk bagi mereka yang disabel (Budiraharso, 2014:75; Susanti, 2014:19, 110-112, 141-142).

Karakter *taking care of* yang lainnya juga nyata dalam bagaimana Risma gencar mengentaskan kemiskinan. Lagi-lagi ini didorong oleh pengalamannya menyaksikan sendiri bagaimana orang miskin di Kota Surabaya berjuang mempertahankan hidup mereka. Pengalaman Risma terjun langsung mendaftar Jaminan Keamanan Nasional (JKN) menjadi kesempatan yang membukakan matanya tentang kemiskinan warga Kota Surabaya. Seorang pendaftar yang adalah seorang pembantu mengaku tidak memiliki uang (sebelumnya seseorang harus memiliki uang supaya dapat mendaftar JKN). “Saya tidak punya uang kalau setiap mengurus surat-surat harus mengeluarkan uang,” kata orang itu (Semesta, 2014:142-143). Risma merasa terharu dan tidak hanya membantu orang miskin ini (Semesta, 2014:143; Susanti, 2014:143-144), tetapi juga bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Kota Surabaya gencar memerangi kemiskinan dan membersihkan pengemis dari jalanan ibu kota (pengemis dianggap merendahkan martabat bangsa), mengorganisasi berbagai pelatihan bagi kaum miskin supaya mandiri, memperbaiki kawasan kumuh, dan sebagainya (Dinanta, 2014:28-30). Bagian kepedulian dan tekadnya mengentaskan kemiskinan juga nyata dalam kebijakan pembangunan. Dalam kasus pembangunan jalan tol di tengah Kota Surabaya yang semula disetujui DPRD, Risma justru menentang dan menolaknya. Penolakan ini berangkat dari keberpihakannya pada kaum miskin dan rakyat kebanyakan bahwa pembangunan seharusnya mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Daripada membangun jalan tol yang hanya menguntungkan segelintir orang, lebih baik membangun satelit-satelit baru di wilayah suburban untuk mengurangi pertumbuhan di wilayah pusat (Rini, 2014:83; Asrof, 2014:71-83; Dinanta, 2014:63-65).

Tri Rismaharini juga peduli pada upaya membangun kota yang lebih sehat, tidak hanya melalui pembangunan taman kota, tetapi juga membersihkan kota dari sampah, membangun *ecco school* dan *ecco mobile* (Semesta, 2014:131-137; Susanti 2014:77-80, 85-87) yang melibatkan hampir 2000 sekolah di Kota Surabaya. Sebagai catatan, program *eco school* dicetuskan agar anak-anak dibiasakan mencintai lingkungan, menjaga kebersihan, memiliki kemampuan mengelola sampah, mengembalikan keseimbangan alam, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak dibiasakan menjadi duta lingkungan. Sementara itu, melalui program *eco mobile*, mobil bertenaga surya bergerak mengunjungi sekolah-sekolah, masyarakat, dan sebagainya untuk mensosialisasikan kesadaran akan keselamatan lingkungan. Sementara itu, di bidang pendidikan, Risma tidak hanya menyediakan pendidikan gratis dan sumbangan uang saku bagi anak miskin atau sumbangan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu, tetapi juga terjun langsung ke sekolah-sekolah memberi motivasi kepada anak-anak miskin supaya rajin belajar (Asrof, 2014:34-35).

Karakter 3: Pribadi yang peduli (care giving)

Menurut Joan C. Tronto, tindakan nyata dalam menciptakan kehidupan yang lebih manusia pada level *taking care of* harus didukung oleh kompetensi (Gastmans, 2006:183). Karakter *care giving* dalam pemahaman Tronto sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa tindakan etis *caring* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diharapkan, dan ini sangat tergantung pada kompetensi, baik menyangkut kemampuan para *care giver* maupun berbagai sarana yang digunakan dalam tindakan etis. Dalam kasus praktik politik berkepedulian yang ditunjukkan oleh Tri Rismaharini, orang dapat saja berpendapat bahwa sebagai seorang wali kota, dia memiliki tidak hanya kompetensi, tetapi berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek-proyek politiknya. Kesan ini jauh dari watak kepedulian yang diperlihatkan Risma. Kekuasaan yang dia miliki tidak dijadikannya sebagai sarana untuk mewujudkan ambisi pribadinya, tetapi justru demi kebaikan seluruh masyarakat kota. Ini nyata dalam berbagai aksi nyata menutup lokalisasi, mengentaskan kemiskinan, membangun taman, memromosikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, memotivasi peserta didik yang miskin supaya tetap bersemangat dalam menimba ilmu pengetahuan, dan sebagainya sebagaimana diuraikan di atas.

Salah satu bahaya praktik kekuasaan berkarakter *caring* adalah paternalisme, yaitu pemimpin lebih mengetahui apa yang dibutuhkan warganya; karena itu, dia berhak memutuskan tindakan apa yang cocok dijalankan demi kepentingan warga dimaksud. Kecenderungan semacam ini tidak hanya menjadikan warga sebagai objek tindakan moral, tetapi juga menjauhkan sang pemimpin dari kerja sama dengan berbagai elemen yang ada dalam masyarakat demi mewujudkan idealisme politiknya. Kesan semacam ini tidak ditemukan dalam praktik politik Tri Rismaharini. Dalam menjalankan berbagai proyek politiknya yang berkepedulian, Risma juga memiliki kompetensi manajerial, terutama usahanya menggalang dukungan dari berbagai pihak, misalnya Majelis Ulama Indonesia (Budiraharso, 2014:115-116), Ormas Islam (Budiraharso, 2014:116-117), pemerintah pusat dan birokrasi daerah (Budiraharso, 2014:119-120), wakil rakyat di Kota Surabaya (Budiraharso, 2014:119-120), berbagai partai politik (Budiraharso, 2014:121), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Budiraharso, 2014:122).

Karakter 4: Pribadi yang dipedulikan (care receiving)

Etika kepedulian harus merupakan sebuah pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pelaku moral. Ini penting untuk menghindari upaya mengobjektifikasi para penerima etika kepedulian (*care receiver*). Dalam konteks di mana kaum rentan (*vulnerable*) penerima tindakan moral (orang sakit, kaum miskin, perempuan, anak-anak, dan semacamnya) tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam tindakan etis berkepedulian timbal-balik, ucapan terima kasih dapat menjadi wujud keterlibatan penerima tindakan moral dalam etika kepedulian. Demikianlah, menurut Joan C. Tronto, ucapan terima kasih adalah tanggapan positif dari para penerima *care* (Gastmans, 2006:183). Ucapan terima kasih itu menunjukkan adanya interaksi dinamis antara *care giver* dan *care receiver*. Interaksi semacam ini menunjukkan keterlibatan ketika penerima kepedulian diperhitungkan sebagai pribadi yang tidak dapat didegradasikan semata-mata sebagai objek tindakan moral. “A caring person should be able to listen, ask questions, gave a conversation,

pay attention to the other person's well-being, as well as be attentive and responsive" (Gastmans, 2006:138).

Dalam kasus praktik politik Tri Rismaharini, keterlibatan masyarakat nyata dalam bagaimana mereka berusaha melindungi dan membela sang Wali Kota dari upaya pemaksaan atau dari ancaman dan teror pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan-kebijakannya. Risma pernah hampir dimaksulkan oleh anggota DPRD karena menaikkan pajak reklame, dan masyarakat secara sukarela membela dia (Rini, 2014:5; Dinanta, 2014:59-60). Masyarakat luas tidak ingin Risma mundur atau meninggalkan jabatannya (Rini, 2014:19-30; Dinanta, 2014:76-83). Seorang warga bahkan mengatakan, "Kemajuan kota ini tidak hanya diapresiasi berupa penghargaan skal nasional, tapi juga sudah diakui dunia. Saya yakin itu juga dirasakan warga Surabaya" (Rini, 2014:26). Sementara itu, Gerakan *Save Risma* yang muncul secara spontan dari berbagai lapisan masyarakat (juga dari mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional) menjadi bukti timbal balik keterlibatan warga masyarakat dalam program-program kerja yang mengusung etika kepedulian sang Wali Kota (Semesta, 2014:68; Asrof, 2014:39; Rini, 2014:26-28; Asrof, 2014:115-116).

Karakter 5: Kepedulian sebagai keutamaan

Karena etika kepedulian melibatkan emosi yang mendalam, sebagian pemikir berpendapat bahwa jenis etika ini bersifat sangat subjektif, mudah berubah, dan sangat tergantung pada keadaan hati subjek moral ketika menghadapi situasi moral. Sebagaimana ditegaskan Chris Gastmans dan pemikir-pemikir lainnya, aspek emosional dan afektif dalam etika kepedulian tidak dapat dinafikan, justru itu yang menjadi kekuatan etika ini. Putusan untuk bertindak secara moral tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga digerakkan oleh emosi atau perasaan keterlibatan tertentu.

Masalahnya adalah apakah etika kepedulian murni bersifat subjektif. Emosi atau aspek afektif dalam etika kepedulian itu sebuah kondisi yang niscaya, tetapi itu tidak berarti bahwa kepedulian adalah hasil dari emosi yang mudah berubah. Ditempatkan dalam konteks keutamaan, etika kepedulian justru menunjukkan watak tetapnya bahwa *"The virtue of care that motivates us to caring behaviour cannot be fleeting, nor linked to the passing moment. On the contrary, virtues must be lasting. It is important to warn against the danger of an emotivist concept of care that would reduce caring involvement to some form of sentimentality"* (Gastmans, 2006:138). Berbeda dengan dorongan emosi atau perasaan yang sifatnya alamiah, kepedulian sebagai keutamaan menuntut kekuatan komitmen dalam membentuk diri menjadi manusia berkeutamaan, menuntut adanya pengambilan risiko dan semacam penyangkalan diri terhadap dorongan-dorongan yang sifatnya alamiah. Pembentukan pribadi moral yang berkeutamaan bukanlah proses instan, melainkan sebuah proses yang lama dan terus-menerus.

Kepedulian merupakan keutamaan nyata dalam diri Tri Rismaharini dan cara dia menjalankan kekuasaannya. Sikap kepedulian Risma bukanlah dorongan emosi sesaat, melainkan sebuah keutamaan yang sudah terbentuk sejak kecil. Sejak kecil Risma sudah diajarkan untuk peduli pada sesama, jujur, dan bekerja keras. Ayahnya bahkan mendidik Risma harus mengalah

demis orang yang kurang beruntung (Budiraharso, 2014:10; Susanti, 2014:61; Asrof, 2014:3-4). Dia juga belajar dari kedua orangtuanya untuk memiliki sikap kuat, berani, dan tidak kenal kompromi terhadap kesalahan dan kejahatan (Budiraharso, 2014:61; Dinanta, 2014:90-93). Sikap berani ini nyata dalam bagaimana dia mengambil putusan-putusan yang berisiko, seperti menutup lokalisasi, menaikkan harga sewa reklame, menolak pembangunan jalan tol, bahkan keberanian untuk mengambil risiko dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri (Budiraharso, 2014:103). Dia juga tidak gentar menghadapi para penentang kebijakannya (Budiraharso, 2014:105, 107; Semesta, 2014:62-64; Susanti, 2014:27-29; Asrof, 2014:120). Bahkan, keberaniannya justru disegani dan ditakuti lawan-lawan politiknya (Rini, 2014:71-73; Asrof, 2014:139-149).

Sikap kepedulian Risma juga bersumber dari keutamaan kejujuran yang telah terbentuk sejak kecil. Sejak remaja Risma memang anti menyontek (Asrof, 2014:13-14; Dinanata, 2014:12-14). Kebiasaan berperilaku jujur ini menjadi sikap moral dalam menjalankan birokrasi. Dia sangat menekankan transparansi. Misalnya, berbagai proyek dilakukan secara daring (*online*), upaya penyederhanaan birokrasi dengan sistem daring, dan sebagainya yang ternyata mampu mengurangi jumlah PNS secara signifikan (dari 2000-an yang akan pensiun digantikan hanya oleh 300-an PNS) (Semesta, 2014:38-39). Kejujuran juga nyata dalam politik transparansi anggaran, misalnya melalui *e-procurement* (Asrof, 2014:129-132; Dinanta, 2014:49-50). Kejujuran dan ketegasan Risma juga nyata dalam sikapnya menolak upaya sogok yang dilakukan oleh konsorsium pembangunan jalan tol (Asrof, 2014:73-74). Para pengkritik etika kepedulian sering beranggapan bahwa jenis etika ini tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga lemah dalam arti tidak tegas. Padahal sikap lemah lembut tidak harus berarti sikap lemah. Risma justru sangat tegas dalam bersikap dan dalam menegakkan disiplin. Misalnya, dia tidak segan menindak PNS yang indisipliner (Rini, 2014:81; Susanti, 2014:118-120).

Karakter 6: Kewajiban memroteksi dan menghindarkan seseorang dari bahaya dan kematian

Etika kepedulian tidak dapat direduksikan semata-mata sebagai teori etika yang menekankan perasaan subjektif pelaku moral terhadap fenomena moral tertentu. Karena itu, tindakan moral berdasarkan prinsip etika kepedulian tetap dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif. Salah satu objektivitas tindakan moral berdasarkan prinsip etika kepedulian adalah kewajiban pelaku moral dalam melindungi dan menghindarkan *moral patient* dari bahaya atau kehancuran (Noddings, 2002:32-35).

Karakter kepedulian jenis ini juga tampak dalam praktik kepemimpinan berkepedulian Risma, terutama ketika terjun langsung dan mengarahkan birokrasi untuk segera menolong dan menyelamatkan warga Surabaya yang diterjang banjir (Rini, 2014:90-91; Semesta, 2014:54-56). Juga ketika Risma dan jajarannya cepat turun tangan menyelamatkan korban kebakaran (Rini, 2014:92), bergerak cepat menutup berbagai lokalisasi di Surabaya (Semesta, 2014:57; Asrof Fitri, 2014:58-61) demi menyelamatkan anak-anak yang bermukim di sekitar lokalisasi. Tentang pentingnya memroteksi anak-anak dan generasi mendatang dari bahaya prostitusi, Risma bahkan mengeskpresikannya secara sangat dramatis dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi

nasional. Sambil berurai air mata, karena lokalisasi melibatkan anak-anak, Risma berujar, “Tidak tega saya Mereka masih SMP-SMA” (Ilham, 2014:77-78).

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai sebuah pendekatan yang sangat menonjolkan pendekatan melibatkan orang lain sebagai subjek dalam setiap perencanaan dan pengambilan putusan publik, dan menghargai orang lain sebagai pribadi, pendekatan etika kepedulian diyakini mampu memertahankan, melanjutkan, atau memperbaiki keadaan masyarakat. Etika kepedulian dengan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana diuraikan di atas dapat merawat atau “mengemong” kehidupan bersama. Dalam konteks kehidupan masyarakat Kota Surabaya, kehidupan bersama yang dibangun oleh Risma adalah sebuah komunitas tempat setiap orang merasa seperti di rumah sendiri ketika diperhatikan, dipedulikan, dan dimajukan kepentingan-kepentingannya.

Meskipun demikian, catatan kritis yang berlaku bagi etika kepedulian pada umumnya, juga berlaku bagi praktik etika kepedulian dalam konteks politik di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini. Etika kepedulian berurusan dengan orang di sekitar, orang dekat, atau orang kita. Etika kepedulian sering dikritik hanya mampu dipraktikkan dalam komunitas kecil dan tidak pernah dipraktikkan dalam konteks negara, misalnya. Ini sejalan dengan kritik sebagian etikawan yang melihat kesulitan untuk mempraktikkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang jauh dari subjek moral (Slote, 2007:27-28). Dalam perspektif Nel Noddings, misalnya, etika kepedulian sebagai sebuah keutamaan harus dapat disemaikan sejak dari rumah. Pendidikan sering dipandang sebagai sarana dalam memajukan karakter berkepedulian, itu – dalam perspektif Noddings – dilakukan sejak dini di rumah (Noddings, 2002). Itu berartirumah menjadi model bagi praktik etika kepedulian.

Dalam konteks inilah terletak problem praktik etika kepedulian di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini. Pertanyaan yang masih harus dijawab adalah sejauh mana praktik etika kepedulian semacam itu mampu melampaui ruang parokialisme – misalnya kepedulian hanya pada kelompok tertentu saja (kaum perempuan, kaum disabel, para PSK, dan sebagainya) – dan menjadikannya sebagai dasar bagi sebuah praktik politik yang lebih luas. Gagasan bahwa Taman Kota sebagai ruang publik mampu meleburkan masyarakat yang beranekaragam latar suku, agama, dan budayanya, menjadi sebuah masyarakat yang plural dapat dikatakan mumpuni dan berhasil dalam menginjeksikan kesadaran etika kepedulian sebagai yang mampu melampaui karakter lokalitasnya. Demikian pula dengan berbagai upaya menutup lokalisasi untuk menyelamatkan generasi muda dan generasi yang akan datang. Hanya masih harus dicek apakah hati yang peduli dan penuh empati itu juga ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat lain yang memang bukan kelompok rentan, misalnya orang kaya. Sejauh mana kepentingan mereka diperhatikan dan direalisasikan? Apakah mereka hanya dilihat sebagai kelompok “*trouble maker*” yang kepentingan-kepentingannya hanya akan merugikan kaum rentan?

Jika etika kepedulian hendak dijadikan dasar bagi praktik politik, yang harus dilakukan adalah menciptakan institusi-institusi yang berkepedulian. Dalam arti itu, usul Joan C. Tronto tidak hanya tepat, tetapi juga mampu meletakkan dasar bagi praktik politik yang berkepedulian.

Pertama, etika kepedulian seharusnya tidak tergantung pada pribadi atau sosok yang memerintah, tetapi menginstitusi. Memang selalu ada masalah, misalnya, bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki keutamaan kepedulian. Dalam arti itu, etika kepedulian dengan model praktik kepedulian di rumah seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan dalam sebuah negara (usul Nel Noddings). Dalam jangka panjang, proposal semacam ini sangatlah tepat. *Kedua*, dalam kasus seorang pemimpin atau penguasa kurang memiliki keutamaan kepedulian, pendekatan keadilan dapat ditonjolkan, tetapi di lain pihak nilai-nilai etika kepedulian diwacanakan dan diterima untuk memperkaya pendekatan keadilan tersebut. Dalam konteks praktik politik di Kota Surabaya, proposal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya pemimpin baru pasca-Risma yang bisa jadi tidak memiliki watak etika kepedulian.

PUSTAKA ACUAN

- Asrof, F.A. (2014). *Serpihan kisah Bu Risma*. Yogyakarta: Penerbit Real Books.
- Boss, J.A. (2008). *Ethics for life: a text with readings*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Budiraharso, S.A. (2014). *Risma. perempuan hebat dan fenomenal*. Jakarta: Penerbit Sinar Kejora.
- Ciulla, J.B. (2009). Leadership and the ethics of care. *Journal of Business Ethics*, 88.1, 3-4.
- Dinanta, R. (2014). *Ibu Risma memimpin dengan hati*. Yogyakarta: Penerbit Giga Pustaka.
- French, W. & Weis, A. (2000). An Ethics of Care or an Ethics of Justice. *Journal of Business Ethics*, 27:125–136.
- Gastmans, C.(2006). The care perspective in health care. Dalam: Davis, A., Tschudin, V., &Tew, L. (Ed.).*Essentials of teaching and learning in nursing ethics. Perspectives and Methods*. Edinburgh:Elsevier.
- Guest, G. (2012). *Applied thematic analysis*. California: Sage Publication.
- Held, V. (2006). *The ethics of care: personal, political, and global*. New York: Oxford University Press.
- Knights, David, Majella, & O’Leary (2006). Leadership, ethics, and responsibility to the other. *Journal of Business Ethics*, 88(1):125-137.
- Manning, R.C. (1998). A care approach. Dalam: Kuhse, H. & Singer, P. *A companion to bioethics* (hlm. 98–105). Oxford (UK): Blackwell Publishers.
- Noddings, N. (2002). *Starting at home. Caring and social policy*. Berkeley:University of California Press.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. Berkeley: University of California Press.